

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memandangi masa pasca Pemilu atau enam bulan sebelum pergantian presiden-wapres terpilih, menjadi masa paling krusial dalam pengelolaan sumber daya alam.

Jakarta, HanTer - Menurut analisis Walhi, dari rezim ke rezim pemerintahan, masa transisi pemerintahan menjadi masa yang rawan bagi masa depan lingkungan hidup karena di masa ini, sejumlah perizinan penggunaan lahan dan hutan diterbitkan.

"Masa transisi pemerintahan adalah masa yang rawan bagi masa depan lingkungan hidup karena sejumlah perizinan yang dikeluarkan pada masa transisi. Ada kelonggaran perhatian publik terhadap perizinan yang keluar pada masa-masa transisi," kata Ketua Tim Adhoc Politik Walhi, Khalisah Khalid, di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Ia menyebut walau secara statistik ada penurunan jumlah perizinan pada periode kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, namun ada pertumbuhan perizinan sek-

WALHI: WASPADA PENERBITAN IZIN DI MASA TRANSISI PEMERINTAHAN



ILUSTRASI

tor kehutanan sejak 2016. Selain itu di akhir 2018 lalu juga terjadi pelepas-

an kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT Hardaya Inti

Plantations di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang dinilai sebagai

preseden buruk bagi pemerintah saat ini. "Pelepasan kawasan

hutan ini dilakukan oleh Menteri Siti tak lama setelah penerbitan Inpres

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," katanya.

Ia menambahkan, kerawanan lainnya dapat dilihat dari perizinan sektor kehutanan untuk HPH seluas 2.156.605 hektar dan HTI 815.505 hektar. "Dua jenis perizinan itu penyumbang luas paling besar pada masa transisi (pemerintahan)," katanya.

Pihaknya pun menyayangkan dengan visi misi Presiden Jokowi yang ingin menyederhanakan perizinan untuk menggenjot investasi. "Kondisi ini diperparah dengan semangat presiden yang hendak menyederhanakan perizinan, bahkan menghapus skema perizinan guna memberikan 'karpet merah' bagi investasi," katanya.

Pihaknya pun meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih ketat mengawasi dan tidak meneruskan tren penerbitan izin besar-besaran untuk kepentingan bisnis pada masa transisi pemerintahan.

■ Arbi

Survei: Pola Pengasuhan Anak di Indonesia Memprihatinkan



LENNY N ROSALIN

Jakarta, HanTer - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menilai kondisi pengasuhan anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, terlihat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015

yang menemukan 10 persen balita mendapatkan pengasuhan yang tidak layak.

"Masih banyak anak yang mengalami pengasuhan yang tidak optimal dari para orang tua atau pengasuh," kata Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Lenny mengatakan orang tua dan pengasuh memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan bakat sesuai minat, mencegah perkawinan usia anak, bahkan memberikan pendidikan

an karakter kepada anak.

Menurut Lenny, hal itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah dua kali mengalami perubahan.

Lenny mengatakan kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan pengasuhan anak yang masih belum banyak diatur dalam regulasi nasional yang komprehensif dan terukur. "Hal itu untuk mengantarkan anak Indonesia mendapatkan pengasuhan yang optimal berbasis hak anak menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045," katanya.

■ Danial

Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Pendidikan

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan pemerintahan baru bisa membenahi tata kelola pendidikan yang ada di Tanah Air.

"Kami ucapkan selamat kepada Presiden Jokowi yang terpilih kembali untuk periode kedua dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah sukses menyelenggarakan pemilu dengan baik," ujar Unifah di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Dia menambahkan ke depan perlunya perbaikan ekosistem tata kelola pendidikan agar berkeadilan antara pusat dan daerah.

Unifah memberi contoh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering telat akibatnya banyak sekolah kesulitan untuk membayar listrik dan operasional sekolah karena BOS nya yang telat.

"Begitu kalau di suatu daerah, belum selesai laporannya maka sekolah lain belum bisa menerimanya. Untuk itu, kami minta agar pemerintahan yang baru yakni Jokowi-KH Ma'ruf memperbaikinya," tambah dia.

Selain itu juga pembagian kewenangan pendidikan dasar dan menengah, yang menurutnya perlu dievaluasi kembali karena menimbulkan pemisahan tanggung jawab antardaerah. Padahal



ILUSTRASI

seharusnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak saling melempar tanggung jawab. "Tentang guru juga perlu dievaluasi, kajian bagaimana kualitas guru meningkat, tunjangan prestasi tepat waktu dan bagaimana peran pusat lebih banyak lagi,"

papar dia. Dengan adanya ekosistem tata kelola pendidikan yang baik maka akan tercipta pendidikan bermutu dan guru bisa menjadi manajer pembelajaran yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat.

■ Ant

Penguatan SDM Mendesak Guna Siapkan Generasi Emas 2045

Jakarta, HanTer - Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, diperlukan penguatan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan serta kompetensi agar mampu berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber tenaga kerja profesional dan mampu melahirkan berbagai inovasi dan terobosan.

Dia mengatakan pendidikan vokasi menjadi penting untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dan keterampilan siap pakai bagi masa depan mereka. Dalam peningkatan keterampilan mahasiswa,

maka pendidikan dengan praktik langsung di lapangan menjadi kunci.

Kemenristekdikti, katanya, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan dan pendidikan secara nyata kepada mahasiswa untuk membekali mereka menjadi lulusan yang berkualitas.

"Kalau keterampilan makin baik dan dia bisa diterima di industri karena dia praktik di industri di sana, itu berarti dia lulus siap untuk bekerja. Kalau sumber daya kita siap, untuk itu di tahun 2045 tenaga kerja sudah siap," ujarnya, Selasa (21/5/2019).

Menteri Nasir menuturkan bonus demografi

Indonesia harus dipersiapkan dengan optimal agar menjadi generasi yang terampil, cerdas, profesional dan berdaya saing sehingga akan menjadi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Jika tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka bonus demografi dengan jumlah manusia produktif yang lebih mendominasi akan menjadi beban bagi ekonomi bangsa.

Dia menuturkan perguruan tinggi juga harus mengajarkan mahasiswa tentang keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ke depan sehingga ada modifikasi pada kurikulum tentang kebutuhan industri

dan kemampuan akademik agar lulusan perguruan tinggi siap masuk dunia kerja dan dunia usaha.

Perguruan tinggi juga memegang peranan untuk melatih mahasiswa untuk dua sasaran yakni menjadikan mereka sebagai pencipta lapangan kerja atau pengusaha, atau menjadi pencari kerja profesional.

"Ini perlu ada suatu perubahan-perubahan kurikulum, laboratorium, sistem pembelajarannya harus diubah, pendekatan antara praktik dan teori harus kita imbangkan, 'outcome'-nya (hasil) nanti pada kompetensi," tegasnya, dilansir Antara.

■ Sammy

PENGUMUMAN
Terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019, Representative Office Tae Kyung Trading Co., Ltd. yang berkedudukan di Jakarta Utara. Tidak lagi beroperasi dan menyatakan DITUTUP.
Kepada para pihak yang berkepentingan dapat menghubungi di 021 29557353. Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak pengumuman ini.
WINDA

PENGUMUMAN
BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT.BYTAGO MANDIRI INDOGARMEN MENUNJUK Tuan LIE HERU SETIANTO SEBAGAI LIKUIDATOR, UNTUK MENGHADAP DAN MENANDATANGI SERTA MELAKUKAN TINDAKAN YANG DIPERLUKAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN SILAKAN MENGHUBUNGI Tuan LIE HERU SETIANTO SEBAGAI LIKUIDATOR.
LIKUIDATOR

PENGUMUMAN
Berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota KOPERASI KARYAWAN PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA ("Koperasi") tanggal 12 Februari 2019, bahwa anggota Koperasi telah memutuskan hal-hal antara lain sebagai berikut :
- Menyatakan pembubaran Koperasi yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Mei 2018.
- Menunjuk/mengangkat Tim Penyelesai untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu, sehubungan dengan hak dan kewajiban Koperasi dalam rangka pembubaran Koperasi.
Kepada para pihak yang berkepentingan (kreditor), agar dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 hari dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai.
Jakarta, 26 Februari 2019
ttd
Tim Penyelesai



RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan mengenai perubahan informasi (RALAT) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang telah dimuat di Harian TERBIT pada hari Jumat, 03 Mei 2019 yaitu mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019 menjadi pada tanggal 28 Juni 2019 dengan tambahan agenda Rapat Perseroan. Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : 15.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Ratifikasi Perbuatan Hukum Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan.
9. Lain - Lain.

CATATAN:

- 1) Yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di PT KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah Pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB.
- 2) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh sebagai pemegang kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
- 3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, nomor telepon: (021) 29745222, nomor fax: (021) 29289961;
- 4) Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat.
- 6) Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.
- 7) Demi keterlibatan rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2019
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan